IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Diajukan oleh:

LILIS ARISKA
07011181722010

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA OGAN ILIR

JULI, 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

LILIS ARISKA
NIM. 07011181722010

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2021

Pembimbing I

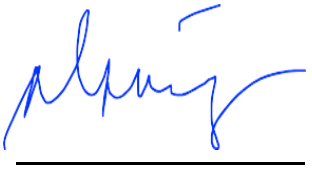

Dr.Alamsyah,S.IP.,M.Si
NIP.197808182009121002

Pembimbing II

Junaidi, S.IP.,M.Si
NIP. 197603092008011009

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 3 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
Ketua

Junaidi,S.IP.,M.Si
Anggota

Dr. Nengyanti, M.Hum
Anggota

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.
Anggota

Indaralaya, September 2021
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,

Prof Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Lilis Ariska
Nim	:	07011181722010
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi	:	Kebijakan Publik
Judul Skripsi	:	Implementasi Kebijakan Program pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
Alamat	:	Kel. Timbangan, Indralaya Utara, Ogan Ilir
No. HP	:	082285344409

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya merupakan jiplakan karya orang lain (plagiatrisme) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Indralaya

Yang membuat pernyataan

Lilis Ariska

NIM.

MOTTO

MAN JADDA WA JADA

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil)

Ku persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Kakak dan Adik-adik tersayang**
- **Kawan Seperjuangan**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi dan mendeskripsikan kinerja implementasi kebijakan Program Pembinaan Anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir . Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dan reduksi data menggunakan Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum tercapainya seluruh indikator model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) sebagai pengukur keberhasilan dari proses implementasi kebijakan Program Pembinaan Anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) dan kinerja *output policy* dari Purwanto (2012). Hasil penelitian menunjukan kinerja implementasi kebijakan Program Pembinaan Anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sudah terapai namun belum sepenuhnya maksimal. Enam faktor-faktor implementasi yang mempengaruhi kebijakan tersebut yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, komunikasi antar organisasi dan beragam aktivitas penguatan, kondisi sosial, ekonomi dan politik, karakteristik agen pelaksana dan disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukan kebijakan program Pembinaan Anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir belum maksimal dikarenakan sumber daya anggaran yang minim sehingga menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memenuhi standar. Penelitian juga menunjukan bahwa belum adanya Peraturan daerah atau sejenisnya di tingkat daerah yang mengatur permasalahan anak terlantar di daerah Ogan Ilir serta dilihat dari kinerja outputnya bahwa indikator akses, cakupan dan bias juga masih belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor standar dan tujuan kebijakan dan sumber daya anggarankebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Anak Terlantar, Kabupaten Ogan Ilir

ABSTRACT

This study aims to find out implementation factors and describe the performance of the implementation of the policy of abandoned Child Development Program in North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency. The type of research used is a qualitative descriptive research type with data collection techniques in the form of observations, interviews, and documentation. Data analysis and reduction techniques using Atlas.ti. The results showed that all indicators of the policy implementation model of Van Meter and Van Horn (1975) have not been achieved as a measure of the success of the policy implementation process of the abandoned Child Development Program in North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency. This study uses the theory of policy implementation of Van Meter and Van Horn (1975) and *output policy* performance from Purwanto (2012). The results showed the performance of the implementation of the policy of the Abandoned Child Development Program in North Indralaya Subdistrict, Ogan Ilir Regency is already achieved but has not been fully maximized. Good implementation factors that affect the policy are standards and policy objectives, policy resources, communication between organizations and various strengthening activities, social, economic and political conditions, characteristics of implementing agents and disposition of implementors. The results showed that the policy of abandoned Child Development program in North Indralaya Subdistrict of Ogan Ilir Regency has not been maximized due to low budget resources, resulting in the implementation of the policy has not fully met the standards. Research also shows that there is no local regulation or the like at the regional level that regulates the problem of displaced children in the Ogan Ilir area and judging by the performance of its output that indicators of access, coverage and bias are also still not optimal because it is influenced by standard factors and policy objectives and policy budgetresources.

Keywords: Implementation, Policy, Abandoned Children, Ogan Ilir Regency

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatdan ridho-Nya lah dapat diberi kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul Implementasi Kebijakan program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis tuturkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat kurikulum di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada saat melakukan pembuatan skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang membantu sehingga rampunglah isi dari proposal ini. Sebab itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua tercinta Bapak Tarmizi dan Ibu Nunya yang selalu memberikan semangat dan tidak bosannya memberikan doa yang terbai supaya anak-anaknya dapat sukses dunia dan akhirat.
2. Saudara kandung saya Sinta Purnama dan Gita Sri Devi yang selalu memberikan doa dan bantuan secara finansial.
3. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Bapak Dr.Alamsyah,S.IP.,M.Si dan bapak Junaidi, S.IP.,M.Si. Sebagai dosen pembimbing yang selalu membantu, memberikan arahan serta ilmu untuk menyelesaikan proposal ini dengan baik
8. Ibu Sri Minarni Selaku Kabid Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial DINSOS OI, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan untuk penelitian
9. Kakak Sandi Wijaya selaku Bakti Sosial Dinsos Ogan Ilir yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan untuk penelitian
10. Ibu Nazuah selaku ketua Yayasan LKSA Mekar Ayu yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan untuk penelitian
11. Pak Edi dan Pak Alan yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan penjelasan untuk penelitian
12. Seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk mengejar kelulusan ini, Hilda Aisyah Salsabil, Meilina Yusnitha, Alok Patris dan Intan Saputra, Syafira Meutia, Refianti Intan, Farhan, Yosef Prengky, Vi Madjid.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langung maupun tidak langsung selama proses pembuatan skripsi
14. Almamater tercinta

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata penulis mohon maaf dan menerima saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Indralaya, Agustus 2021
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGSKRIPSI.....
MOTTO.....
ABSTRAK.....i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTARTABEL.....ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR SINGKATAN xi

BAB I PENDAHULUAN 12
A. LatarBelakang.....12
B. RumusanMasalah.....21
C. TujuanPenelitian.....21
D. ManfaatPenelitian.....21

BAB II TINJAUANPUSTAKA.....23
A. PenelitianTerdahulu.....23
B. LandasanTeori 26
C. Teori YangDigunakan 39
D. KerangkaTeori.....41
E. Kerangka Pemikiran 46

BAB III METODE PENELITIAN.....48
A. JenisPenelitian.....48
B. DefinisiKonsep 48
C. FokusPenelitian.....50
D. Jenis dan SumberData 54
E. InformanPenelitian.....54
F. Teknik PengumpulanData.....54
G. Teknik Analisis Data 55

H. JadwalPenelitian 60
I. SistematikaPenulisan 60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 62
A. Gambaran Umum LokasiPenelitian 62
B. Sejarah Singkat dan Kondisi Umum Dinas Sosial OganIlir 64
C. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Mekar Ayu OganIlir 76
D. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kabupaten OganIlir 78
E. Deskripsi InformanPenelitian 79
F. Analisis Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara kabupaten OganIlir 80
1. Standar dan TujuanKebijakan 80
a) StandarKebijakan 81
b) TujuanKebijakan 84
2. Sumber DayaKebijakan 85
a) Sumber DayaManusia 87
b) Sumber DayaAnggaran 89
c) Sumber daya Sarana danPrasarana 91
d) Sumber Daya Data danInformasi 92
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Beragama AktivitasPenguatan 93
a) Partisipasi dan Kerjasama 94
4. Kondisi Sosial, Ekonomi danPolitik 96
a) Pengaruh LingkunganSosial 97
b) Pengaruh LingkunganEkonomi 101
c) Pengaruh LingkunganPolitik 103
5. Karakteristik Agen pelaksana 104
6. Disposisi Implementor kebijakan Gambar 4. 14 DisposisiImplementor 106
a) Pemahaman ImplementorKebijakan 107
b) Arahan dan Respon ImplementorKebijakan 108
G. Analisis Kinerja Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten OganIlir 109
a) Akses 110
b) Cakupan 113
c) Bias 116
H. Diskusi 119

BAB VPENUTUP 127

1. Kesimpulan 127

2. Saran.....130

DAFTAR PUSTAKA 132

Lampiran.....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah AMPK, Anak Jalanan, Anak Terlantar. 5

Tabel 1. 2 Tabel Jumlah Anak Terlantar, Pelaku Kenakalan Remaja di Sumsel.....6

Tabel 1. 3 Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Ogan Ilir. 8

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... 13

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian. 45

Tabel 3. 2 Tahapan Kegiatan dalam Penelitian. 53

Tabel 4. 1 Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan..... 61

Tabel 4. 3 Deskripsi Informan..... 70

Tabel 4. 4 Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Ogan Ilir..... 76

Tabel 4. 5 Sumber Daya Manusia Yayasan LKSA Mekar Ayu..... 77

Tabel 4. 6 Persentase Tingkat Pendidikan kabupaten/Kota tahun 2018.....88

Tabel 4. 7 Komposisi Anak Asuh yang ada di Yayasan LKSA Mekar Ayu..... 103

Tabel 4. 8 Hasil Rekap Analisa Penelitian dan Analis Temuan Penelitian..... 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tujuan Sustainable Development Goals. 2
Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Van Horn danVan Meter 39
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran..... 41
Gambar 3. 1 Analisis Data Model Interaktif Menurut Miles Huberman (1994) 52
Gambar 4. 1 Peta dan Lambang Kabupaten..... 55
Gambar 4. 2 Standar dan Tujuan Kebijakan..... 71
Gambar 4. 3 Izin Operasional Yayasan LKSA Mekar Ayu 73
Gambar 4. 4 SumberDayaKebijakan 75
Gambar 4. 5 Buku Rekening Penerima Manfaat Programdari APBN..... 79
Gambar 4. 6 Pemberian Bantuan Kepada Anak-anakPenerimaProgram..... 80
Gambar 4. 7 Sarana dan prasarana Yayasan LKSAMekar Ayu 81
Gambar 4. 8 Pola KomunikasiAntarOrganisasi..... 83
Gambar 4. 9 BentukPeralatan Komunikasi..... 85
Gambar 4. 10 Kondisi Sosial, Ekonomidan Politik 86
Gambar 4. 11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten diSumateraSelatan 89
Gambar 4. 12 Tingkat Pengangguran KabupatenOganIlir 92
Gambar 4. 13 Karakteristik AgenPelaksanaKebijakan..... 94
Gambar 4. 14DisposisiImplementor 96
Gambar 4. 15Kinerja Implementasi..... 99
Gambar 4. 16 Data Base Anak Yayasan LKSAMekar Ayu 100
Gambar 4. 17 Hasil Selective Coding Indikator AksesImplementasi kebijakan 102
Gambar 4. 18 Data Anak Penerima Bantuan Program PembinaanAnakTerlantar 104
Gambar 4. 19 Dokumentasi Penyerahan Bantuan dariSwadaya Masyarakat 106
Gambar 4. 20 Hasil *Selective Coding* Indikator Bias KebijakanAnak Terlantar..... 107

DAFTAR SINGKATAN

SDGs	: Sustainable Development Goals
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
DINSOS	: Dinas Sosial
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
PEKSOS	: Pekerja Sosial
IPSM	: Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat
OI	: Ogan Ilir
KABID	: Kepala Bidang
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan. Bentuk pelaksanaan yang dilakukan bersama pemimpin negara lainnya adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan,mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Rencana pembangunan berkelanjutan ini kemudian disebut dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut SDGs memiliki 17 tujuan. Dari 17 tujuan yang telah ditetapkan ini, maka dengan indikator dan sasaran yang sesuai akan memberikan dampak dari tujuan SDGs tersebut. Oleh karena itu pemerintah dengan sigap melakukan pembangunan keberlanjutan untuk Indonesia agar dapat tercapai.

Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan tentu harus menjadi prioritas pemerintah yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, *stakeholder* yang ada serta semua lapisan masyarakat agar nanti nya di tahun 2030 pembangunan yang diharapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Walaupun Indonesia telah bertahap mencapai dari indikator tersebut dari 17 tujuan atau indikator SDGs tersebut namun kenyataannya beberapa harus dilanjutkan dalam pelaksanaan dan lebih diperhatikan dan salah satunya ada permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya fakir miskin dan anak terlantar yang sebagaiman telah di atur dalam aturan tertulis Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Gambar 1. 1 Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sumber : http://sdgs.bappenas.go.id

Dari 17 tujuan SDGs seperti tampak pada Gambar 1.1, ada 1 tujuan yang sangat penting yakni menghapus kemiskinan. Salah satu target dan indikatornya ialah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Dengan demikian jelas bahwa penanganan anak terlantar merupakan salah satu agenda yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan penghapusan kemiskinan. Anak terlantar berlatar belakang dari ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan hak-hak yang seharusnya, karena kondisi ekonomi dan lingkungan yang tidak memadai.

Anak adalah amanah dan juga karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa

harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia sumber daya insani untuk pembangunan nasional serta sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Oleh karena itu anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, pemberdayaan dan perlindungan dari diskriminasi yang ada. Demi perbaikan kualitas sumber daya manusia untuk negeri ini maka diperlukannya pembinaan dan pemberdayaan terus menerus secara optimal untuk anak-anak bangsa yang didalamnya termasuk anak jalanan dan anakterlantar.

Dalam rangka mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan pemeliharaan anak-anak dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Ketentuan yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 34 ayat 1-4 tentang Kehidupan Sosial Kenegaraan yang berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeliharanegara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabatkemanusiaan
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yanglayak
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana pasal ini diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan dari pasal 34 Undang Undang Dasar 1945 tersebut khususnya pasal 1 bahwa Negara wajib memelihara anak-anak terlantar dengan memberikan perlindungan, pemberdayaan dan memelihara mereka sesuai dengan peraturan tersebut. Didalam pasal 28B UUD 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa "Setiap hak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dandiskriminasi", termasuk didalamnya anak terlantar. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Jadi dapat disimpulkan bahwa negara

mempunyai kewajiban untuk memelihara anak terlantar dengan menyediakan fasilitas pelayanan serta memberikan pemberdayaan kepada mereka sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan menurut Permensos Nomor 4 Tahun 2020 :

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi."

Adapun kriteria anak terlantar adalah sebagai berikut (Permensos No. 4 Tahun 2020) yakni : tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan, tidak ada lagi perorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus, rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya ;dan/atau masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah,eksploitasi,dan penelantaran. Seperti yang yang telah ditulis diatas bahwa beberapa ciri anak terlantar seperti misalnya tidak memiliki tempat tinggal yang akhirnya hanya memungkinkan untuk tinggal di jalanan secara berpindah-pindah, tidak memiliki sanak keluarga yang mengasuh dan merawat, umumnya pernah mengalami tindak kekerasan atau menjadi korban kriminalisasi dan penelantaran. Secara khusus Indonesia memiliki aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan telah disusun bersinergi dengan kebijakan nasional dalam pemerintahan era Jokowi-JK yang memulai pemerintahannya di tahun 2015. UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar,baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Dan terakhir lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar.Fenomena anak jalanan atau anak

terlantar yang ada di Indonesia tidak bisa di pandang sebelah mata oleh pemerintah karena bagaimanapun anak adalah aset negara yang nantinya menjadi penerus kehidupan yang akan datang. pada tahun2019.

Tabel 1. 1 Data Jumlah AMPK, Anak Jalanan, Anak Terlantar, Balita, AMPFS Tahun 2019

No.	Kategori	2019	2020
1	Anak Jalanan	8320	
2	Balita	8507	
3	Anak Terlantar	64053	
4	AMPK	6572	
5.	AMPFS	92861	
Total		183104	

Sumber : Diolah Penulis dari sumber data www.kemensos.go.id

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tercatat hingga 2019 sebanyak 183.104 anak dengan rincian 6.572 AMPK, 8.320Anjal, 8.507 Balita, 92.861 AMPFS dan 64.053 Anak Terlantar. Berdasarkan keberadaannya, dari 183.104 anak tersebut terdiri dari 106.406 Anak di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan 76.698 Anak didalam Keluarga. Data ini kemudian anak menjadi basis data dalam pemberian bantuan sosial maupun intervensi program rehabilitasi sosial anak lainnya.

Anak terlantar yang notabenenya tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia memang harus menjadi prioritas utama penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan terkait anak terlantar. Sumatera Selatan dengan ibukota Palembang merupakan salah satu provinsi yang cukup besar dan berkembang pesat, sehingga tak luput dari permasalahan anak terlantar yang ada. Fenomena anak terlantar yang biasanya mencakup gelandangan,

pengamen dan pengemis ini cukup meresahkan masyarakat. Selain karna mereka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dipelihara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Pasal 34 ayat (1). Berikut ini tabel data jumlah anak terlantar dari BPS Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1.2 Tabel Jumlah Anak Terlantar, Pelaku Kenakalan Remaja dan Tuna Sosial di Provinsi Sumatera Selatan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Keterangan				
		Anak Terlantar	Nakal	Tuna Sosial	Pengemis	Gelandangan
1	OKU	0	34	30	12	8
2	OKI	121	0	2	10	16
3	Muara Enim	18	10	0	7	13
4	Lahat	143	9	20	12	60
5	Musi Rawas	112	48	0	0	4
6	Musi Banyuasin	51	29	325	40	35
7	Banyuasin	579	8	3	8	35
8	OKU Selatan	1285	0	49	0	38
9	OKU Timur	29	0	35	46	30
10	Ogan Ilir	162	27	5	1	7
11	Empat Lawang	262	91	25	0	0
12	Palembang	21	86	50	95	38
13	Prabumulih	31	5	240	4	0
24	Pagaralam	18	2	0	1	3
15	Lubuk Linggau	354	0	124	20	1
Total		3179	349	908	260	288

***Sumber** : Diolah Penulis dari sumber Bps Dinas Kesejahteraan SosialSumatera Selatan*

Berdasarkan Tabel 1.2, ternyata Sumatera Selatan juga mempunyai permasalahan anak terlantar yang cukup tinggi. Data yang menunjukan angka dari jumlah anak terlantar dan sebagainya adalah bukti nyata dari apa yang kita lihat di jalanan. Anak terlantar yang

biasanya berada sepanjang jalan ramai dan dekat dengan kerumunan memicu pemandangan yang tidak enak jika dipandang,mereka biasanya meminta- minta,mengamen atau sekedar berkumpul di tepi jalan dan pertokoan ramai,hal ini sungguh miris dimana seharusnya anak-anak haknya dilindungi dan dipelihara oleh negara malah harus bertahan dengan kerasnya hidup dijalanan yang tak luput juga dari tindak kriminal.

Situasi yang sama juga dialami Kabupaten Ogan Ilir. Meskipun baru berusia 16 tahun, Kabupaten Ogan Ilir sendiri tak luput dari fenomena anak terlantar yang meningkat dan tak kalah dari kota besar lainya misalnya seperti kota Palembang yang hanya berjarak kurang lebih satu jam saja. Fenomena anak jalanan yang kian meningkat ini dipicu beberapa faktor, salah satunya adalah indralaya utara yang merupakan kecamatan di kabupaten Ogan Ilir dengan lokasi strategis pusat dari Universitas Sriwijaya dan mobilitas Palembang dengan daerah dan kabupaten/kota lainnya sehingga hal ini cukup padat ramai dengan adanya mahasiswa dan pegawai universitas Sriwijaya menggunakan bus, Transmusi maupun kendaraan pribadi. Hal inilah yang kemudian juga membawa anak-anak terlantar atau jalanan yang biasanya mereka menjadi pengamen , pengemis atau anak punk banyak terlihat di Kecamatan Indralaya Utara dan ditambah lagi yang memang anak terlantar domisili Ogan Ilir itu sendiri. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Sandi Wijaya selaku staf pendamping program pemberdayaan anak terlantar Dinas Sosial Ogan Ilir bahwa faktor pemicu munculnya anak jalanan adalah Indralaya menjadi salah satu daerah geografis strategis antar kabupaten dan provinsi di Sumatera Selatan. Hal ini juga sejalan dengan penemuan penelitian sebelumnya Gerhard Yonatan Yedija Siahaan (2017) bahwa salah satu faktor eksternal mencakup : lingkungan, letak geografis dan lemahnya penanganan gelandangan dan pengemis.

Tabel 1.3 Jumlah Anak Terlantar di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020

Kategori Usia	Laki-Laki	Perempuan
< 3 tahun	-	-
3 - 6 tahun	1	3
7 - 12 tahun	18	12
13 - <18 tahun	24	22
18 tahun keatas	-	-
Total	43	37

Sumber : Diolah penulis dari data Dinas Sosial Ogan Ilir

Berdasarkan Tabel 1.3, menunjukan bahwa jumlah rentang umur 13 tahun sampai dengan 18 tahun adalah yang paling banyak menjadi anak terlantar khususnya di daerah kabupaten Ogan Ilir. Dengan jumlah total 80 anak terlantar yang terdata oleh Dinas Sosial kabupaten Ogan Ilir. Selain itu jenis kelamin laki- laki yang cukup mendominasi dari banyaknya anak terlantar yang ada di kabupaten Ogan Ilir. Namun jumlah data ini juga di luar dari data anak terlantar yang singgah dan tidak terdata oleh tim Dinas Sosial Ogan Ilir, mereka ini biasa nya adalah golongan dari anak-anak punk atau anak yang berasal dari daerah lain kemudian berpindah lagi ke tempat lain, karena dilihat dari letak geografisnya Ogan Ilir dengan Pusat Indralaya adalah daerah strategis dari mobilitas jalan lintas antar provinsi dan kabupaten yang cukup ramai. Jika dilihat fenomena anak terlantar ini begitu miris mereka yang berada di jalanan dengan pakaian yang tidak layak semakin marak dan bertambah jumlahnya, mereka terpaksa hidup di jalanan karena berbagai sebab. Anak-anak yang seharusnya bermain, belajar dan dilindungi harus berbaur dengan jalanan, di pinggir toko, bus dan keramaian dengan berjualan barang, mengemis, mengamen, pemulung ataupun menjadi anak gepeng dengan penuh tribute tidak layak.

Anak-anak dalam hal hal ini harus dilindungi dan dipelihara oleh negara karena mereka adalah aset negara yang harus dididik dan dibina terus menerus. Secara Spesifik Dinas Sosial Ogan Ilir bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak

terlantar di wilayah kabupaten Ogan Ilir khususnya Indralaya Utara karena kian hari mengalami kenaikan problematik anak terlantar. Jika penanganannya kurang serius maka sangat dikhawatirkan anak-anak terlantar ini menyimpang dari norma-norma dan nilai kehidupan dalam bermasyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Sebagai bagian dari masalah sosial, anak terlantar sudah menarik minat para peneliti di Tanah Air. Sebagian peneliti menemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab keberadaan anak jalanan di kota Balikpapan yakni : faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, kemauan sendiri dan kurangnya perhatian dari pemerintah (Purwoko 2013). Temuan ini dikuatkan (Multaza *et al.* 2016) dan Rizzana et al.,(2006) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Malang dinilai belum cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari peran para aktor pelaksana yang belum maksimal. Tetapi, riset Sukadi (2013) menemukan hal yang berbeda. Menurut Sukadi (2013) bahwa belum maksimal dikarenakan kendala dalam perlindungan hak anak terlantar masih belum sangat diperhatikan oleh Pemerintah dan penegakan hukum tidak optimal dengan banyaknya keterbatasan sumberdaya.

Sementara itu, beberapa penelitian lainnya lebih fokus untuk menjelaskan tema kurangnya partisipasi masyarakat sekitar Panti Sosial Asuhan dalam pembinaan dan pengawasan moral anak terlantar Multaza *et al.* (2016). Sebaliknya riset dari Aman *et al.* (2017) lebih fokus ke program implementasi pemberdayaan anak. Menurut Aman et al., (2017), aspek komunikasi dan aspek sumber daya ini masih belum berjalan dengan optimal. Aspek Disposisi belum berjalan dengan baik karena masih banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan masih bersikap belum jujur apalagi untuk pengalokasian dana bantuan untuk anak terlantar serta struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena pihak dinas sosial kurang berkoordinasi dengan pihak lain diluar maupun didalam birokrasi padahal banyak pihak yang harus dilibatkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang anak terlantar masih bersifat kontroversial.

Penelitian ini dirancang untuk berkontribusi dalam perdebatan ilmiah tentang anak jalanan. Sejauh ini, sepanjang pengetahuan peneliti, belum banyak penelitian yang mencoba mengelaborasi program pemberdayaan anak jalanan dengan teori Van Meter dan Van Horn (1975). Padahal, beberapa variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn (1975) masih sangat relevan dan mampu menjelaskan faktor-faktor pelaksanaan upaya pemberdayaan anak jalanan di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir".

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Kinerja Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis faktor-faktor implementasi kebijakan pembinaan anak terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
2. Untuk mendeskripsikan Kinerja Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Terlantar di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk ilmu pengetahuan khususnya mengenai anak terlantar yang dikaji dari Kebijakan Publik. Penelitian ini juga diharapkan bisa dikembangkan lebih lanjut oleh akademisi untuk penelitian berikutnya. Dan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

2. Secara Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan untuk menjadi rujukan dalam melakukan penelitian serta dapat menjadi masukan bagi Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Sosial Ogan Ilir untukmeningkatkan kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abidin,Said Zainal.2012. *Kebijakan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi*). Bandung : CV Alfabeta

Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remadja Karya.

Dye, Thomas R. 1987. *Understanding Public Policy*. USA : Prentice-Hall Englewood Cliffs. Jakarta.: Bumi Aksara

Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Gava Media

Miles.,Huberman. 1994. *Qualitative data analysis : An expanded sourcebook (2nd ed.). thousand Oaks,,* CA: Sage Publication

Nugroho,Ryant.2011.*Public Policy*. Surabaya : PMN

Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep danaplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Siagian, S. P. (2002). *Manajemen sumber daya manusia.* Jakarta: Bumi aksara. Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode penelitian survei.* Jakarta : LP3ES. Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif.* (edisi ke 3). Bandung : Alfabeta.

Suharto, Edi. (2010). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Bandung : Alfabeta.

Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*

Wibawa, S., Purbokusumo, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Media Pressindo.

ARTIKEL JURNAL ILMIAH, SKRIPSI, TESIS DAN DOKUMEN LAINNYA

Aman, F., Tindjabate, C., & Natsir, N. (2017). Implementasi Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar (Pksa) Di Dinas Sosial Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*, *5*(12), 165–176.

Bappenas. (2017). Ringkasan Metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. In *Kementerian PPN / Bappenas*.

Fitri, F. A., Alsunah, M. D., & Febriani, P. (2020). Implementasi Program Pembinaan Anak Terlantar. *2*(4), 12–31. J*urnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)* Volume 2 No. 4 – 30 April2020

Multaza, M., Mukmin, Z., & Ali, H. (2016). Peran Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh dalam Usaha Pembinaan Moral Anak-Anak Terlantar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, *1*(1), 1– 11.

Namma, R. H., Setiamandani, E. D., Studi, P., Administrasi, I., & Tunggadewi, U.T. (2017). *Implementasi Program Kebijakan Kota Layak Anak*. *6*(3), 22–27.

Purwoko, T. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan. *EJournal Sosiologi,1*(4), 13–25.

Qamariah, M., Afifuddin, & Suyeno. (2020). Implementasi Program Bantuan Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Lansia. Terlantar (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu) Jurusan Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang , Jl . MT Haryono 193 Malang , 65144 , Indonesia LPP. *Jurnal Respon Publik*, *14*(4), 1–7.

Sandi, I. (2016). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, *4*(5), 150–160.

Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *Journal de Jure*, *5*(2), 117–133.

Sylvia Rizzana Moch. Saleh Soeaidy Minto Hadi. (2006). Analisis Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Dalam Rangka Pengentasan Dari Segala Bentuk Eksploitasi. *E-Journa*l *Administrasi Publik*, *34*(11), e77–e77. 81

Nasirin, C. (2013). Program pemberdayaan anak-anak terlantar di Nusa Tenggara Barat. *Sosiohumaniora*, *15*(3),239-252.

Ambat, T. (2013). Fungsi Negara Memelihara Anak-Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Lex Administratum*, *1*(2).

INTERNET / HALAMAN WEB

Anonim. Anak Terlantar.https://paralegal.id/pengertian/anak-terlantar/.(online). Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 20.00 WIB

DOKUMEN

Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Terlantar

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak